

LAPORAN THESIS

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER POLRI DALAM PENUGASAN
BAWAH KENDALI OPERASI (BKO) KEPOLISIAN BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi Kasus Operasi Damai Cartenz Papua)**

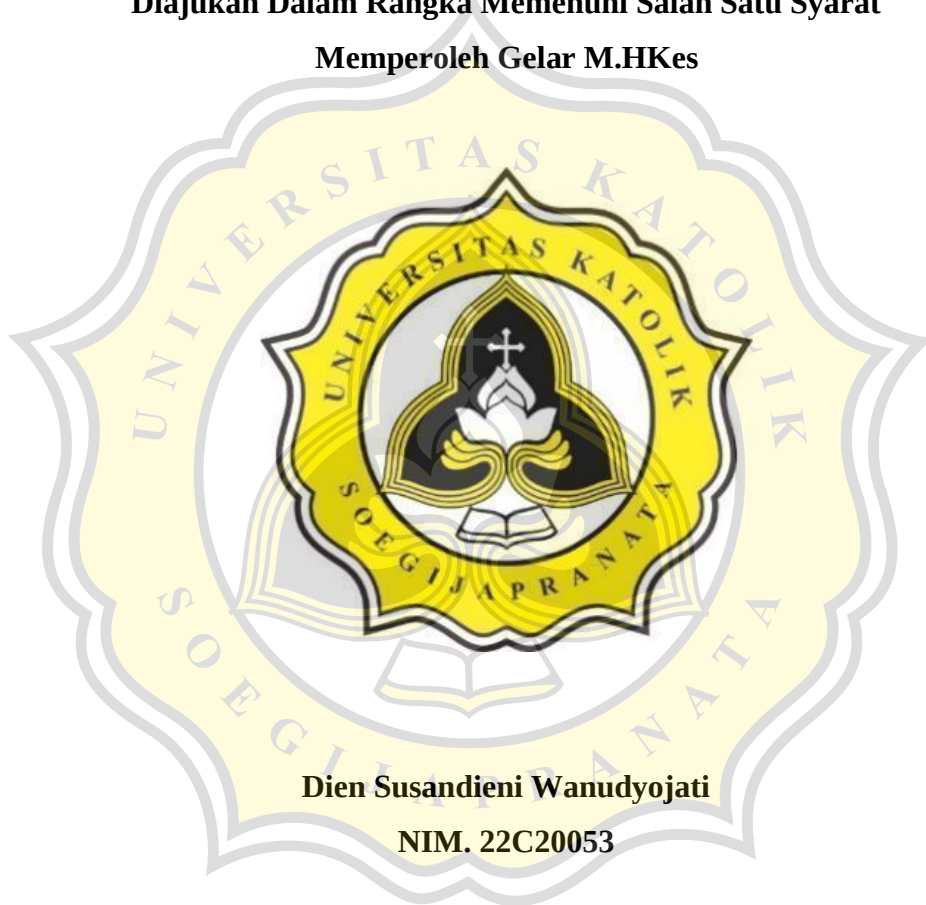


**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2025**

LAPORAN THESIS

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER POLRI DALAM PENUGASAN
BAWAH KENDALI OPERASI (BKO) KEPOLISIAN BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI KASUS OPERASI DAMAI CARTENZ PAPUA)**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar M.HKes**



Dien Susandieni Wanudyojati

NIM. 22C20053

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Operasi Damai Cartenz di Papua yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Bentuk dukungan pada operasi Kepolisian adalah penggunaan kekuatan dan kemampuan personel, dari berbagai fungsi pada Polri. BKO adalah personel organik suatu Satker yang diperbantukan pada satker lain untuk melaksanakan tugas operasional berdasarkan perintah Kasatker atau kepala operasi tempat BKO. Dokter Kepolisian dalam rangka mendukung operasi Kepolisian mengirimkan personelnnya yang fokus pada pelayanan kesehatan dan tindakan medis. Tetapi dokter kepolisian selama ini belum ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum secara eksplisit dalam suatu peraturan.

Metode Pendekatan penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (*social legal research*), Desain Penelitian adalah *prescriptive design*, Jenis Pengumpulan Data Jenis data primer dan sekunder, Metode Pengumpulan Data sekunder akan dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan data primer dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*), Metode Pengolahan dan Penyajian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian berupa data hasil wawancara dan studi pustaka akan diolah terlebih dahulu sebelum dianalisis, Metode Analisis Data, Data yang telah diolah dan dipilih kemudian akan disusun dan dilakukan proses analisis data.

Hasil penelitian adalah penugasan Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian belum memberikan perlindungan bagi dokter sebagai petugas medis, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Dokter Polri dalam penugasan BKO Kepolisian masih memiliki kelemahan berupa kelemahan substansi hukum, Solusi perlindungan hukum bagi Dokter Polri dalam penugasan BKO Kepolisian berupa membuat pedoman tertulis dalam bentuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penugasan di daerah Konflik dengan memasukkan beberapa Pasal pada Undang-undang Konvensi Jenewa, dengan dibuatnya Perkapolri ini Selain memberikan rasa aman kepada tenaga medis, hal ini juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dalam situasi yang paling genting sekalipun. Membuat sistem pengawasan bagi pelanggaran penugasan bagi dokter sebagai tenaga medis pada operasi BKO, termasuk sanksi administratif sesuai kode etik kepolisian yang berlaku bagi pihak yang menugaskan tenaga medis dalam operasi BKO diluar kompetensinya.

KATA KUNCI: *Pelindungan hukum, Dokter Polisi, Bawah Kendali Operasi*

ABSTRAK

The National Police is a state instrument that plays a role in maintaining security and guarding the community, enforcing the law, and providing protection, guidance and services to the community in order to maintain domestic security. The Cartenz Peace Operation in Papua aims to maintain security stability and protect the community. The form of support for Police operations is the use of the strengths and abilities of personnel from various functions within the National Police. BKO's are organic personnel from a Satker who are seconded to another Satker to carry out operational tasks based on orders from the Kasatker or head of operations at the BKO location. Police Doctors in order to support Police operations send personnel who focus on health services and medical procedures. However, so far there have been no regulations that regulate legal protection explicitly in a regulation for police doctors.

Method: This research approach is a sociological juridical method (social legal research), the research design is prescriptive design, the type of data collection is primary and secondary data, the secondary data collection method will be carried out through literature study and documentation, while the primary data is analyzed using content analysis. analysis), Method of Processing and Presenting data that has been obtained from research results in the form of data from interviews and literature studies will be processed first before being analyzed, Data Analysis Method, Data that has been processed and selected will then be compiled and the data analysis process will be carried out.

The results of the research are that the Police Under Operational Control (BKO) assignment has not provided protection for doctors as medical officers. The implementation of legal protection for Police Doctors in Police BKO assignments still has weaknesses in the form of weaknesses in legal substance. The legal protection solution for Police Doctors in Police BKO assignments is to create written guidelines in the form of a Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia (Perkapolri) regarding legal protection for health workers on assignments in conflict areas by including several articles in the Geneva Convention Law, with the making of this Perkapolri, apart from providing a sense of security to the medical staff, this also reflects the country's commitment to protecting human values in even the most critical situations. Create a monitoring system for violations of the assignment of doctors as medical personnel in BKO operations, including administrative sanctions in accordance with the police code of ethics that apply to parties who assign medical personnel to BKO operations outside their competence.

KEYWORDS: *Legal protection, Police Doctor, Under Operational Control*